

Ulasan Buku

Orang Indonesia Tionghoa dan Persoalan Identitas

Samsul Huda

Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Afthonul Afif, *Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Parikesit Institute, 2010).

Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, terj. Maria Elvire Sundah, (Jakarta: Gramedia, 2010).

Pendahuluan

Di dalam abad globalisasi yang penuh percepatan seperti sekarang, perjumpaan dengan orang lain (*the other*) adalah sebuah keniscayaan. Dalam perjumpaan itu, identitas tidak lagi kaku, melainkan mencair (*fluid*) dan berubah-ubah (*flexible*).¹ Studi Makmur tentang migrasi orang Toraja di Tombang, misalnya, menunjukkan bagaimana lama-kelamaan terjadi konversi agama di kalangan pendatang, menyesuaikan dengan penduduk asli.²

Kedatangan orang Tionghoa di Nusantara dari wilayah yang sekarang dirujuk sebagai negara China juga menyebabkan perubahan-perubahan identitas pada dirinya maupun penduduk tempatan. Dalam hal beragama, Taylor memperlihatkan bahwa

kedatangan tersebut berpengaruh pada terjadinya islamisasi di Nusantara; kedatangan Islam dibawa oleh orang Tionghoa.³

Dalam diskusi tentang teori kedatangan Islam di Nusantara, pendapat tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya, Tuanku Rao dan Slamet Mulyana telah menyebutkan demikian.⁴ Al Qurtuby bahkan dengan tegas mengatakan, dibanding dua teori kedatangan Islam lainnya, yakni teori Arab dan India, teori Tionghoa jauh lebih kuat. Namun, seperti kata Taylor, “Menghubungkan Tionghoa dan keaslian Islam di dunia Melayu-Indonesia adalah topik sensitif”,⁵ teori Tionghoa berusaha “dihapuskan” oleh kekuasaan. Buku *Tuanku Rao* yang menguatkan teori Tionghoa, misalnya, dibredel oleh Kejaksaan Agung pada setelah terbit pada 1964. Demikian pula buku Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa*, mengalami nasib serupa.⁶ Walhasil, hubungan Tionghoa-Islam seolah-olah sesuatu yang aneh.

Keanehan ditambah dengan kenyataan bahwa Islam bukanlah agama yang dianut oleh mayoritas etnis Tionghoa.

Hal itu ditambah dengan kebijakan Orde Baru yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Di dalam perundang-undangan, menurut Lindsey, diskriminasi setidaknya dapat dibagi menjadi lima topik: diskriminasi dalam kartu identitas (KTP), larangan penggunaan nama Tionghoa, pembatasan bahasa Tionghoa di ranah publik, pembatasan akses dalam pendidikan, dan pembatasan kesempatan ekonomi.⁷

Sejak Reformasi, berbagai diskriminasi itu telah dihapuskan.⁸ Tionghoa antara lain bisa merayakan tahun baru Imlek yang bahkan menjadi hari libur nasional, kesenian Tionghoa seperti Barongsai diperbolehkan, serta diizinkan mendirikan partai politik. Sejak Reformasi pula, bahasa Tionghoa juga dipakai dalam berita di televisi maupun koran. Di Jambi, beberapa koran memiliki rubrik khusus tentang etnis Tionghoa, antara lain “Komunitas” (*Jambi Independent*) dan “Metro Xinwen” (*Jambi Ekspres*). Pertanyaannya, apakah dalam kondisi demikian pencarian identitas Tionghoa telah selesai atau apakah etnis Tionghoa telah menemukan identitas mereka?

Tionghoa dan Agama

Identitas sesungguhnya tidak tunggal, melainkan bisa bertumpuk atau bahkan bercampur (*hybrid*). Seseorang bisa menjadi Tionghoa sekaligus menjadi Muslim. Atau barangkali kategorisasinya kemudian bercampur: Muslim Tionghoa. Hal ini tergambar jelas dalam buku Afthonul Afif, *Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*.

Buku yang berasal dari tesis di Sekolah Pascasarjana UGM ini mengambil seting penelitian di Yogyakarta. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam buku tersebut adalah bagaimana strategi pembentukan identitas sosial positif pada Tionghoa Muslim di Yogyakarta. Karena memakai pendekatan psikologi, Afif memakai individu sebagai subjek penelitiannya.

Sebagaimana peneliti-peneliti sebelumnya yang mengategorisasikan orang Indonesia Tionghoa menjadi dua, yakni totok dan peranakan, Afif mendasarkan analisis pada dua kategori tersebut. Totok adalah istilah bagi etnis Tionghoa yang masih “asli”, dalam pengertian masih mempertahankan kebudayaan Tionghoa dan menghindari perkawinan campuran dengan penduduk “pribumi”⁹ meskipun mereka sudah tinggal di Indonesia bahkan sejak sebelum Kemerdekaan. Sementara peranakan untuk menyebut keturunan hasil perkawinan campuran antarmereka.

Menurut Afif, keputusan subjek penelitiannya dalam memeluk Islam tidak didasari oleh alasan tunggal, melainkan beragam. Ada yang memeluk Islam karena alasan hidayah dari Tuhan, rasa syukur atas karunia Tuhan, keselarasan antara ajaran Islam dan budaya Tionghoa, sejenis eskapisme ketika menghadapi persoalan hidup, kekecewaan terhadap ajaran agama yang dianut sebelumnya, semangat Islam yang damai, serta ada juga yang karena mengikuti agama suami atau istri.¹⁰

Dari alasan-alasan tersebut, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Tionghoa totok dan peranakan. Artinya, berbagai alasan itu bisa terdapat baik pada Tionghoa totok maupun peranakan. Yang menarik kemudian, terkait identitas sosial, terdapat kecenderungan kuat di antara Tionghoa totok untuk mengidentifikasi diri sebagai

orang Tionghoa. Alasannya, secara genetis mereka masih “murni” Tionghoa.¹¹ Dalam hal ini, menjadi Muslim bukan merupakan penghalang bagi mereka untuk mengekspresikan diri sebagai orang Tionghoa, walaupun kemudian “tindakan tetap mempraktikkan budaya Tionghoa cenderung sekadar menjadi sarana agar hubungan dengan keluarga besar yang masih mempraktikkan budaya Tionghoa tidak mengalami masalah.”¹²

Hal itu berbeda dengan Tionghoa peranakan yang memeluk Islam. Mereka cenderung mengidentifikasi diri sebagai pribumi. Dalam hal ini, memeluk Islam menjadi semacam alat legitimasi untuk mengidentifikasi sebagai pribumi. Bagi mereka, ikatan dengan sesama Tionghoa juga lemah atau minimal tidak sekuat Tionghoa totok yang berusaha mengidentifikasi sebagai Tionghoa dengan mempraktikkan kebudayaan Tionghoa.¹³ Bahkan jika tengarai Afif benar, yakni mereka mempraktikkan budaya Tionghoa sekadar agar hubungannya dengan sesama Tionghoa tidak mengalami masalah, akan kentara alasan ini merupakan ketakutan mereka untuk tidak disebut Tionghoa lagi.

Dan memang hal terakhir itu kerap terjadi. Dari beberapa subjek yang diteliti, Afif juga menemukan bahwa terjadi eksklusi atau mendapat perlakuan yang kurang baik oleh keluarga ketika Tionghoa totok memeluk Islam. Meski demikian, secara umum, baik totok maupun peranakan menjadi lebih diterima oleh masyarakat pribumi ketika bersama identitas Tionghoa mereka melekat identitas Muslim, yang disebut Afif sebagai “Tionghoa Muslim”, sebagaimana tampak dalam judul buku dan secara konsisten dia gunakan. Padahal, istilah yang lebih banyak terdengar di masyarakat adalah “Muslim Tionghoa”.

Sayangnya, Afif tidak menjelaskan istilah yang dia pakai yang, menurut saya, sesungguhnya sangat urgen. Pertanyaannya, apakah istilah tersebut berasal dari peneliti (dalam hal ini Afif) atautkah dari subjek yang dia teliti? Hemat saya, istilah “Tionghoa Muslim” lebih menekankan ketionghoan ketimbang Muslim-nya atau menjadikan identitas Tionghoa sebagai identitas utama dan Muslim berikutnya—kalau pengurutan atau “stratifikasi” identitas bisa dipakai—

sedangkan “Muslim Tionghoa” kebalikannya. Mencermati kesimpulan Afif bahwa Tionghoa totok tetap mempertahankan ketionghoan mereka, menurut saya, istilah “Tionghoa Muslim” lebih bisa dilekatkan pada mereka. Sedangkan bagi Tionghoa peranakan, tampaknya yang lebih tepat adalah istilah kedua atau “Muslim Tionghoa”.

Identifikasi semacam itu sekarang sedang dibongkar. Dulu istilah yang banyak digunakan adalah “Tionghoa Indonesia”, namun sekarang lebih disarankan menggunakan “Indonesia Tionghoa”, sebagaimana tertera dalam judul buku Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Istilah “Indonesia Tionghoa” digunakan untuk menekankan keindonesiaan Tionghoa. Bagaimanapun etnis Tionghoa telah mendiami Nusantara jauh sebelum Kemerdekaan dan tidak sedikit yang ikut berjuang merebut serta mengisi Kemerdekaan.

Tionghoa dan Media

Kalau Afthonul Afif melihat persoalan identitas etnis Tionghoa terkait agama, Dawis mengamati media, dalam hal ini film. Sebagaimana dikatakan di awal, pada masa Orde Baru etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, salah satunya dilarang mengekspresikan ketionghoan mereka terkait bahasa. Kebijakan asimilasi Orde Baru mengeksklusi mereka sehingga orang Tionghoa tidak dapat belajar bahasa Mandarin di sekolah serta tidak bisa membaca surat kabar berbahasa Mandarin.

Meski demikian, orang Tionghoa mendapatkan akses rekaman video berisi film, utamanya film seri kungfu atau beladiri dan drama yang diimpor dari Taiwan dan Hongkong. Beberapa yang terkenal, demikian dicatat oleh Dawis, adalah *The Legend of the Condor Heroes*, *The Return of the Condor Heroes*, dan *Duke of Mount Deer*.¹⁴ Film-film itu tak hanya hadir sebagai gambar sinema, melainkan juga menjadi kaver buku tulis, yakni buku tulis tersebut diberi gambar pemeran film. Buku tulis tersebut dapat dikonsumsi siapa saja, yang terbanyak adalah para siswa di sekolah dasar dan menengah. Tokoh Andy Lau yang memerankan Yoko dalam *The Return of the Condor Heroes* menjadi buah bibir di masyarakat. Demikian pula kisah asmara Xiao Long

Nu dengan muridnya yang jauh lebih muda, Yoko, mengharu-biru para perempuan.¹⁵

Fenomena film Mandarin tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa film-film tersebut digemari dalam kondisi demikian? Buku terjemahan dari edisi Inggris berjudul *The Chinese of Indonesia and Their Search for Identity: The Relationship between Collective memory and the Media* (USA: Cambria Press, 2009) ini berangkat dari pertanyaan tersebut. Dalam menjawabnya, sama dengan Afif, Dawis juga mendasarkan analisis pada individu, yakni 25 orang Indonesia Tionghoa. Individu-individu tersebut diwawancarai serta diajak berdiskusi dalam beberapa forum *focus group discussion* (FGD).

Menurut Dawis, orang Indonesia Tionghoa memiliki pengalaman yang berbeda-beda ketika menonton film Mandarin di masa penuh larangan. Pengalaman-pengalaman tersebut juga tergantung tempat di mana mereka tinggal, agama yang dianut, serta latar belakang keluarga. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian menjadi ingatan kolektif yang mengingatkan atau memelihara kesadaran identitas bersama (*collective identity*) sebagai Tionghoa. Dalam hal ini, Dawis memakai teorinya John R. Gillis tentang ingatan dan identitas. Menurut Gillis, sebagaimana dikutip Dawis, “orang senantiasa memperbaiki ingatan mereka tentang untuk disesuaikan dengan jati diri mereka... ingatan membantu kita semua memahami dunia di mana kita hidup.” Namun demikian, “‘kerja ingatan’ atau ‘*memory work*’... terikat pada hubungan yang pelik antara kelas, gender, dan kekuasaan yang menentukan apa yang diingat dan/atau apa yang dilupakan.”¹⁶ Dengan begitu, ingatan tidak berada di ruang hampa, melainkan terkait-kelindan dengan banyak faktor.

Di situlah kemudian, ketika ingatan tersebut dikonfirmasi dengan kebijakan asimilasi, terjadi kegamangan, di satu sisi mereka baru merasakan menjadi Tionghoa, namun di sisi lain tidak bisa mengekspresikan ketionghoan itu; negara tak sepenuhnya mengakui identitas mereka. Walhasil, film Mandarin membuat mereka memimpikan “tanah air bayangan” (*mythic homeland*). Namun, ketika memimpikan itu, mereka sadar bahwa di negeri tersebut mereka juga akan asing sebab penanda ketionghoan seperti

bahasa—mereka tidak bisa berbahasa Tionghoa—tidak dipunyai. Orang Tionghoa berada di “garis batas budaya.”¹⁷ Namun demikian, mereka sekaligus juga masuk dalam “ruang baru” tempat “mereka dapat merumuskan ulang pengalaman sosial mereka”.¹⁸

Pengalaman seperti itulah yang disebut Stuart Hall sebagai “pengalaman diaspora” yang melibatkan pengakuan perbedaan dan pemahaman hibriditas. Dan itu masih akan berlangsung dalam waktu yang panjang. Di Indonesia, Tionghoa sadar bahwa mereka harus terus-menerus berbaur dengan pribumi serta membaurkan kebudayaan mereka dengan kebudayaan tempatan. Mereka terus-menerus berada dalam proses “menjadi” dari “negeri lama” ke negeri baru bernama Indonesia.

Penutup

Menurut Arjun Appadurai di dalam *Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization*, identitas saat ini berhadapan dengan lalu lintas global yang terus-menerus memberi tawaran-tawaran baru yang dapat dilekatkan sebagai identitas. Alhasil, identitas masyarakat dewasa ini sulit dimengerti.¹⁹

Teori Appadurai tersebut sebenarnya menggambarkan bahwa identitas bisa bertumpuk dan saking bertumpuknya hingga sulit lagi dimengerti yang mana yang sebenarnya identitas. Bukankah identitas mengandaikan perbedaan sebagaimana dikatakan Martin Heidegger, “*identity is identity of identity and difference*”?

Di masa sekarang, bisa saja bukan orang Jawa yang menyukai wayang, melainkan orang Melayu. Pandai berbahasa Arab tidak harus orang Arab, tetapi juga orang Indonesia, dst. Demikian pula, pada masanya, film-film Mandarin seperti dikupas Dawis tidak hanya disukai oleh etnis Tionghoa, melainkan juga banyak masyarakat Indonesia. Melani Budianta di dalam pengantar mengatakan, pada 1980-an saluran televisi yang diizinkan hanya TVRI yang berisi indoktrinasi dan upacara resmi. Dalam konteks itu, wajar kemudian bila masyarakat menyukai tontonan film Mandarin.²⁰

Ketika identitas sekarang menjadi seperti dikatakan Appadurai, fakta sebagaimana ditunjukkan dalam buku Afif dan Dawis, yakni

identitas Tionghoa yang terus dipersoalkan bahkan setelah Reformasi, menandakan bahwa diskriminasi terhadap mereka masih berlangsung hingga kini. Diskriminasi ini sangat terkait dengan penerimaan pribumi terhadap “*the other*”. Dalam hal terakhir ini, saya setuju dengan Afif yang mengusulkan multikulturalisme sebagai obat mujarab.²¹]

Catatan:

¹ Marian Kempny, “Introduction: On ‘Identity’, Fixity, and Change in Social Theory and Social Life under Globalized Conditions”, dalam Marian Kempny dan Aldona Jawlowska (eds.), *Identity in Transformation: Postmodernity, Postcommunism, and Globalization*, (London, Praeger, 2002).

² Ahdi Makmur, “Migran Toraja di Tombang”, dalam Ahmad Sahur et.al., *Migrasi, Kolonisasi, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafiti Kita, 1988).

³ Jean Gelman Taylor, “The Chinese and the Early Centuries of Conversion to Islam in Indonesia”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005), hlm. 148-164.

⁴ Taylor, “The Chinese and the Early”; Al Qurtuby, Sumanto, “Cina dan Proses Islamisasi Jawa”, *Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, No. 14, 2003, hlm. 136-150.

⁵ Taylor, “The Chinese and the Early”, hlm. 148.

⁶ Kedua buku ini diterbitkan kembali oleh LKiS Yogyakarta pasca-Reformasi.

⁷ Tim Lindsey, “Reconstituting the Ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, Racial Discrimination, and Reform”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005), hlm. 53-57.

⁸ Arief Budiman, “Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005), hlm. 95-104.

⁹ Menurut saya, istilah “pribumi” lebih bersifat politis, dalam pengertian terkait penerimaan oleh rezim kuasa. Etnis Tionghoa bahkan telah berada di Nusantara jauh sebelum Kemerdekaan, tetapi karena pada masa lalu tidak diterima oleh penguasa, tidak menjadi pribumi.

¹⁰ Afthonul Afif, *Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Parikesit Institute, 2010), hlm. 167.

¹¹ Afif, *Menjadi Indonesia*, hlm. 187.

¹² Afif, *Menjadi Indonesia*, hlm. 183.

¹³ Afif, *Menjadi Indonesia*, hlm. 187.

¹⁴ Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 3.

ORANG INDONESIA TIONGHOA DAN PERSOALAN IDENTITAS

¹⁵ Dawis, *Orang Indonesia*, hlm. 3-5.

¹⁶ Dawis, *Orang Indonesia*, hlm. 5.

¹⁷ Dawis, *Orang Indonesia*, hlm. 191.

¹⁸ Dawis, *Orang Indonesia*, hlm. 192.

¹⁹ Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).

²⁰ Melani Budianta, "Kata Pengantar", dalam Dawis, *Orang Indonesia*, hlm. xii.

²¹ Afif, *Menjadi Indonesia*, hlm. 204-207.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul, *Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Parikesit Institute, 2010).
- Al Qurtuby, Sumanto, "Cina dan Proses Islamisasi Jawa", *Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, No. 14, 2003: 136-150.
- Appadurai, Arjun, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).
- Budianta, Melani, "Kata Pengantar", dalam Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Budiman, Arief, "Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005): 95-104.
- Dawis, Aimee, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Kempny, Marian, "Introduction: On 'Identity', Fixity, and Change in Social Theory and Social Life under Globalized Conditions", dalam Marian Kempny dan Aldona Jawlowska (eds.), *Identity in Transformation: Postmodernity, Postcommunism, and Globalization*, (London, Praeger, 2002).
- Lindsey, Tim, "Reconstituting the Ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, Racial Discrimination, and Reform", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005): 53-57.
- Makmur, Ahdi, "Migran Toraja di Tombang", dalam Ahmad Sahur *et.al.*, *Migrasi, Kolonisasi, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafiti Kita, 1988).
- Taylor, Jean Gelman, "The Chinese and the Early Centuries of Conversion to Islam in Indonesia", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapura: ISEAS, 2005).